

PENGARUH ADOPSI IFRS, PEMBERIAN INFORMASI NILAI WAJAR, DAN PENGUNGKAPAN JASA PENILAI TERHADAP ASIMETRI INFORMASI PADA EMITEN DI INDONESIA

Felisia Novita Sari¹⁾, Dedhy Sulistiawan²⁾, Aurelia Carina Sutanto³⁾

University of Surabaya, Surabaya

²⁾e-mail: dedhy@ubaya.ac.id

ABSTRACT

This study evaluates the impact of IFRS adoption, fair value information of property, plant, and equipment (PPE), and disclosure of appraiser service into firm's information asymmetry. Information asymmetry is the primary reason for the existence of accounting. Accounting could be a mechanism to enable communication of useful information from insiders to outsiders. IFRS adoption and better disclosure are important factors that avoid exploitation by informed bodies, and protect uninformed investors. Using Indonesian data, this study analyzes two year before and after 2011, an implementation year. This research gives evidence that IFRS adoption is able to decrease information asymmetry. Disclosure of appraiser service is also able to decrease information asymmetry. However, fair value information of PPE is not an important determinant of information asymmetry. Other results present that share prices, share turnover, and firm size can affect the information asymmetry. By knowing the factors affecting the information asymmetry, information asymmetry problem could be minimized. This study concludes that IFRS implementation and disclosure of appraiser service affect information asymmetry.

Keywords: *Information Asymmetry, IFRS, Fair Value, Appraisal, Disclosure, Voluntary Disclosure*

PENDAHULUAN

Asimetri informasi merupakan topik yang penting, karena setiap perusahaan pasti mengalami masalah asimetri informasi (Flannery, Kwan, dan Nimalendran, 2004). Pihak berinformasi memiliki informasi yang lebih superior dibandingkan pihak lainnya. Untuk meminimasi asimetri informasi, maka pengungkapan penuh mengenai informasi privat perusahaan sangat diperlukan (Healy dan Palepu, 2001). Peningkatan pengungkapan informasi menurunkan asimetri informasi antara perusahaan dan pasar, sehingga mampu menurunkan biaya modal perusahaan (Diamond dan Verrecchia, 1991).

Saat ini Indonesia telah resmi mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS). IFRS telah diadopsi oleh Standar Akuntansi

Keuangan (SAK). Manfaat utama yang diharapkan adalah relevansi informasi akuntansi. Studi ini juga meyakini bahwa implementasi IFRS akan menurunkan asimetri informasi.

Penilai eksternal mampu menghasilkan nilai wajar yang lebih andal dibandingkan dengan penilai internal (Dietrich, Harris dan Muller, 2000). Studi ini juga mendukung ide tersebut. Perusahaan mengungkapkan siapa penilai yang terlibat untuk menunjukkan intensi perusahaan dalam menunjukkan keandalan pengukuran nilai wajar yang diberikan. Hal tersebut didasarkan oleh pemikiran bahwa intensi untuk memberikan informasi yang lebih dianggap mampu menurunkan asimetri informasi (Diamond dan Verrecchia, 1991; Leuz dan Verrecchia, 2000). Artinya, studi ini memprediksikan bahwa pengungkapan

jasa penilai akan mempengaruhi asimetri informasi.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan studi berbasis akuntansi berbasis pasar dengan konteks implementasi IFRS. Dukungan bukti yang menyatakan bahwa IFRS mampu menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik sangat diperlukan, terutama dalam hal penyajian nilai wajar.

Untuk membahas isu mengenai implementasi IFRS dan aplikasi penentuan nilai wajarnya, studi ini mengorganisasi artikel ini sebagai berikut. Bagian kedua membahas review literatur dan pengembangan hipotesis. Bagian kedua mendiskusikan sampel dan metodologi. Bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasannya. Kesimpulan disajikan di bagian akhir artikel ini.

REVIEW LITERATUR

Teori keagenan digunakan sebagai landasan teori utama dalam studi ini. Adanya konflik kepentingan antara penyusun laporan keuangan dan pengguna informasi akan memunculkan masalah keagenan, yaitu asimetri informasi.

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dalam transaksi bisnis dimana ada pihak yang memiliki informasi lebih superior dibandingkan pihak lainnya. *Bid-ask Spread* merupakan proksi yang sering digunakan dalam beberapa penelitian untuk mengukur asimetri informasi yang terjadi (Liao *et al.*, 2013). Studi ini juga meyakinkannya. Asimetri informasi yang tinggi menyebabkan investor berinformasi mengeksploitasi informasi yang ia ketahui sehingga cenderung untuk merugikan investor yang kurang berinformasi. Akibatnya, asimetri informasi meningkatkan *bid-ask spread*.

Dampak Adopsi IFRS

Saat ini SAK Indonesia telah resmi mengadopsi IFRS. Aturan itu diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan

entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Adopsi IFRS di Indonesia dilakukan secara bertahap sejak 2007. Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penerapan IFRS adalah keterbandingan, peningkatan transparansi, pengurangan biaya modal, peningkatan investasi global, serta pengurangan beban penyusunan laporan keuangan (IAI, 2009; Zamzami, 2011). Studi Leuz dan Verrecchia (2000) menunjukkan bukti bahwa perusahaan Jerman yang mengadopsi standar internasional mengalami penurunan asimetri informasi. Dengan mengadopsi standar akuntansi internasional, maka perusahaan secara simultan akan meningkatkan level pengungkapannya. Studi ini memprediksi bahwa adopsi IFRS akan menurunkan asimetri informasi. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut.

H1 : Adopsi IFRS menurunkan asimetri informasi pada perusahaan.

Dampak Pemberian Informasi Nilai Wajar

Praktek akuntansi berbasis IFRS sangat erat kaitannya dengan penyajian nilai wajar (IAI, 2012). Penyajian nilai wajar ini dianggap akan memberikan informasi yang relevan bagi investor luar atau pengguna informasi lainnya. Beaver dan Venkatachalam (2003) menunjukkan bahwa manajer (pengelola perusahaan) sering menggunakan informasi nilai wajar untuk mengkomunikasikan keadaan sebenarnya. Pendapat tersebut meyakinkan bahwa pemberian informasi nilai wajar merupakan salah satu metode untuk memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan yang sesungguhnya, sehingga dapat memperkecil asimetri informasi.

Pendapat Beaver dan Venkatachalam (2003) tersebut konsisten dengan studi Muller, Riedl, dan Sellhorn

(2011) yang mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan asimetri informasi antara perusahaan yang memberikan informasi nilai wajar dan perusahaan yang tidak memberikan informasi nilai wajar. Studi ini juga meyakini bahwa pemberian informasi nilai wajar akan menurunkan asimetri informasi. Adapun hipotesisnya disajikan sebagai berikut.

H2 : Pemberian informasi nilai wajar aktif tetap menurunkan asimetri informasi pada perusahaan.

Dampak Pengungkapan Jasa Penilai

Muller dan Riedl (2002) menunjukkan bukti bahwa perusahaan yang menggunakan jasa penilai eksternal cenderung memiliki asimetri informasi yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa penilai internal. Penelitian tersebut menduga bahwa perbedaan asimetri informasi terjadi karena adanya perbedaan keandalan nilai wajar akibat perbedaan penggunaan jasa penilai.

Selaras dengan Muller dan Riedl (2002), penilai eksternal mampu menghasilkan nilai wajar yang lebih andal dibandingkan dengan penilai internal (Dietrich, Harris dan Muller, 2000). Studi ini meyakini bahwa informasi mengenai penilai akan menurunkan asimetri informasi. Jika studi sebelumnya berfokus pada penggolongan jasa penilai internal

dan eksternal, studi ini menggunakan penggolongan berdasarkan keberadaan pengungkapan jasa penilai.

Ketika perusahaan mengungkapkan jasa penilai yang terlibat maka hal tersebut menunjukkan intensi perusahaan untuk menunjukkan keandalan pengukuran nilai wajar yang diberikan. Hal tersebut didasarkan oleh konsep bahwa intensi untuk memberikan informasi yang lebih dianggap mampu menurunkan asimetri informasi (Diamond dan Verrecchia, 1991; Leuz dan Verrecchia, 2000). Sebaliknya, perusahaan yang tidak mengungkapkan jasa penilai maka reliabilitasnya akan berkurang karena investor luar tidak mengetahui reputasi jasa penilai suatu perusahaan.

Adapun hipotesis mengenai pengungkapan jasa penilai dan asimetri informasi disajikan sebagai berikut.

H3 : Pengungkapan mengenai penggunaan jasa penilai menurunkan asimetri informasi pada perusahaan.

METODA RISET

Studi ini menggunakan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009, 2010, 2012, dan 2013. Tahun 2011 adalah tahun pemisah antara periode sebelum dan setelah SAK resmi mengadopsi IFRS. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Proses Seleksi Sampel Penelitian

Keterangan	2009	2010	2012	2013	Total
Badan usaha yang <i>listing</i> di BEI	408	429	473	494	1.804
Badan usaha sektor keuangan	(71)	(71)	(75)	(81)	(298)
Badan usaha yang pelaporannya tidak menggunakan mata uang rupiah	(21)	(20)	(61)	(80)	(182)
Badan usaha yang pelaporannya tidak berakhir pada periode 31 Desember	(1)	(2)	(3)	(2)	(8)
Badan usaha yang menderita rugi	(57)	(49)	(49)	(54)	(209)
Badan usaha dengan nilai PPE <10%	(49)	(65)	(65)	(67)	(246)

Badan usaha dengan data keuangan tidak lengkap	(78)	(54)	(63)	(26)	(221)
Jumlah badan usaha yang memenuhi kriteria	131	168	157	184	640
Badan usaha yang menjadi <i>outlier</i>	(10)	(14)	(12)	(14)	(50)
Jumlah badan usaha yang diteliti	121	154	145	170	590

Variabel penelitian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah asimetri informasi, yang diprosikan oleh *SPREAD*. Variabel *SPREAD* didapatkan dari log nilai rata – rata *Bid - Ask Spread* harian, selama bulan april. Sesuai dengan beberapa penelitian (Muller, Riedl, Sellhorn, 2011; Liao *et al.*, 2013), *Bid - Ask Spread* (BAS) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$BAS = \frac{Ask - Bid}{\frac{(Ask + Bid)}{2}} \quad (1)$$

Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu IFRS, FV_PPE, dan *APPRAISAL*. Ketiga variabel tersebut merupakan *dummy variable*. Variabel IFRS bernilai 1 untuk periode sesudah adopsi IFRS (2012 dan 2013), dan 0 untuk periode sebelum adopsi IFRS (2010 dan 2009). Penelitian ini tidak menggunakan laporan keuangan periode 2011, karena periode ini merupakan periode transisi terakhir sebelum perusahaan *listing* di BEI resmi mengadopsi IFRS per 1 Januari 2012 secara serentak. Pengecualian ini dilakukan untuk mengurangi bias klasifikasi periode sebelum dan sesudah IFRS. Variabel FV_PPE bernilai 1 jika perusahaan memberikan informasi mengenai berapa *fair value* dari PPE (baik melalui pengakuan di neraca / melalui pengungkapan di Catatan Atas Laporan Keuangan), dan 0 jika perusahaan tidak memberikan informasi mengenai berapa nilai wajar PPE yang dimiliki. Variabel *APPRAISAL* bernilai 1 jika perusahaan menunjukan siapa penilai yang terlibat

dalam menentukan nilai wajar PPE, dan 0 untuk sebaliknya. Penilai yang terlibat bisa merupakan penilai independen (eksternal), ataupun penilai dari manajemen sendiri (internal).

Variabel kontrol dalam penelitian dibagi menjadi 4, yaitu *BIG4*, *PRICE*, *TURNOVER*, dan *SIZE*. Variabel *BIG4* bernilai 1 jika perusahaan menggunakan jasa auditor *big 4*, dan 0 untuk sebaliknya. Variabel *PRICE* didapatkan dari nilai log rata – rata *closing price* harian perusahaan selama bulan april. Variabel *TURNOVER* merupakan proksi dari likuiditas saham dan didapatkan dari nilai log rata – rata perputaran saham harian perusahaan diukur selama bulan april. Perputaran saham harian / turnover (T) sendiri didapatkan melalui formula sebagai berikut.

$$T = \frac{Vol}{OS} \quad (2)$$

Notasi Vol dan OS merepresentasikan volume perdagangan saham harian dan saham yang beredar. Variabel *SIZE* didapatkan dari nilai log dari total aset perusahaan per tanggal 31 Desember. Penggunaan model log pada persamaan (untuk variabel dependen dan kontrol) mengacu pada penelitian Muller, Riedl, dan Sellhorn (2011) agar mengakomodasi hubungan *multiplicative* yang dianjurkan oleh riset teoritis mengenai determinan *bid ask spread*. Nilai variabel *SPREAD*, *TURNOVER*, dan *PRICE* diukur secara rata-rata selama bulan april agar dapat menyesuaikan dengan respon pasar setelah penerbitan laporan keuangan. Tiga puluh satu maret merupakan tanggal terakhir perusahaan harus memublikasikan laporan keuangan tahunan mereka, sehingga

pengukuran variabel selama bulan april merupakan jendela pengukuran yang cukup dan tepat untuk melihat reaksi pasar (Muller dan Riedl, 2002; Muller, Riedl, dan Sellhorn, 2011).

Berdasarkan variabel yang ada, terbentuklah model regresi linier berganda yang mengacu pada penelitian Muller, Riedl, dan Sellhorn (2011) seperti berikut:

$$SPREAD = \alpha + \beta_1 IFRS + \beta_2 FV_PPE + \beta_3 APPRAISAL + \beta_4 BIG4 + \beta_5 PRICE + \beta_6 TURNOVER + \beta_7 SIZE + \varepsilon$$

Keterangan :

- α : Koefisien konstanta
- β : Koefisien regresi
- SPREAD : Selisih antara *bid price* dan *ask price*
- IFRS : Periode adopsi IFRS
- FV_PPE : Pemberian informasi nilai wajar PPE perusahaan
- APPRAISAL : Pengungkapan penggunaan jasa *appraisal* perusahaan
- BIG4 : Auditor yang digunakan perusahaan
- PRICE : *Closing Price* saham harian perusahaan
- TURNOVER : Perputaran saham harian perusahaan
- SIZE : Ukuran perusahaan
- e : *Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pertama yang disajikan adalah statistik deskriptif dari 590 perusahaan

yang terpilih menjadi sampel penelitian. Informasinya disajikan di Tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LOGSPREAD	590	-2,747727	,301030	-1,78529047	,500950745
LOGPRICE	590	,501675	5,441381	2,94299106	,697229712
LOGTO	590	-7,927569	-1,100342	-3,37982465	1,049240761
LOGSIZE	590	9,522776	14,330401	12,31514624	,689849200

Pada tabel di atas terdapat empat variabel berskala rasio, yaitu *SPREAD*, *PRICE*, *TURNOVER*, dan *SIZE*. Sedangkan untuk variabel berskala

nominal, yaitu variabel IFRS, *FV_PPE*, *APPRAISAL*, *BIG4*, statistik deskriptif mengenai frekuensi nilainya ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Tabel Frekuensi (%) Variabel Dummy

Variabel Dummy	Ya (1)	Tidak (0)
IFRS	53,4	46,6
FV_PPE	33,6	66,4
APPRAISAL	20,7	79,3
BIG4	43,6	56,4

Dari 590 sampel perusahaan yang diteliti, terdapat 315 perusahaan (53,4%) pada

kondisi setelah adopsi IFRS (tahun 2012 dan 2013), serta 275 perusahaan (46,6%)

pada kondisi sebelum adopsi IFRS (tahun 2009 dan 2010). Selain itu, terdapat 198 perusahaan (33,6%) yang memberikan informasi nilai wajar PPE yang dimiliki, sementara sisanya terdapat 392 perusahaan (66,4%) yang tidak memberikan informasi nilai wajar PPE yang dimiliki. Dari 198 perusahaan yang memberikan informasi nilai wajar PPE, hanya terdapat 20 perusahaan yang menggunakan metode penilaian revaluasi (nilai wajar diakui pada neraca), sementara sisanya menggunakan metode *cost* dalam menilai PPE sehingga hanya memberikan informasi nilai wajar melalui pengungkapan di CALK. Kemudian,

terdapat 122 perusahaan (20,7%) yang memberikan pengungkapan mengenai siapa penilai yang terlibat dalam menentukan nilai wajar PPE perusahaan, sedangkan sisanya yaitu 468 perusahaan (79,3%) tidak mengungkapkan siapa penilai yang terlibat dalam menentukan nilai wajar PPE yang perusahaan miliki. Dan yang terakhir, terdapat 43,6% (257 perusahaan) yang menggunakan jasa audit BIG4. Sementara 56,4% (333 perusahaan) lainnya menggunakan jasa audit selain BIG4.

Selanjutnya, hipotesis diuji dengan analisis regresi linier berganda. Tampilan hasilnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Linier Berganda

Variabel	Nilai t	Sig. (1 sisi)	Kesimpulan
(Constant)	1,118	0,132	-
IFRS	-5,683	0,000***	Terima
FV_PPE	1,430	0,077*	Tolak
APPRAISAL	-3,247	0,000***	Terima
BIG4	-0,724	0,24	Tolak
PRICE	-3,909	0,000***	Terima
TURNOVER	-22,853	0,000***	Terima
SIZE	-8,981	0,000***	Terima

Keterangan : *, **, dan *** artinya signifikan pada level 10%, 5% dan 1%.

Setelah dilakukan uji regresi linier berganda, maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 SPREAD = & 0,323 - 0,162 IFRS + 0,055 \\
 & FV_PPE - 0,139 APPRAISAL - 0,023 \\
 & BIG4 - 0,091 PRICE - 0,296 \\
 & TURNOVER - 0,222 SIZE + \varepsilon
 \end{aligned}$$

Tanda (-) di depan nilai koefisien *IFRS*, *APPRAISAL*, *BIG4*, *PRICE*, *TUNROVER*, *SIZE* menunjukkan bahwa ada hubungan tidak searah antara ke-6 variabel independen tersebut dengan *SPREAD*. Hal tersebut berarti ketika *IFRS*, *APPRAISAL*, *BIG4*, *PRICE*, *TUNROVER*, *SIZE* mengalami peningkatan, maka

variabel *SPREAD* akan mengalami penurunan. Tanda (+) di depan nilai koefisien *FV_PPE* menunjukkan bahwa ada hubungan searah antara variabel independen tersebut dengan variabel *SPREAD*. Hal tersebut berarti ketika terjadi peningkatan pada *FV_PPE*, maka *SPREAD* juga akan meningkat.

Suatu variabel independen dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila memiliki nilai *Sig.(1-tailed)* kurang dari 0,05. Dari tabel 4, terlihat bahwa terdapat 2 variabel utama dan 3 variabel kontrol yang memiliki nilai nilai *Sig.* kurang dari 0,05. Dua variabel utama yang memiliki pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen adalah IFRS dan *APPRAISAL*. Tiga variabel kontrol yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah *PRICE*, *TURNOVER*, dan *SIZE*. Sisanya, terdapat 2 variabel yang secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen asimetri informasi. Kedua variabel tersebut adalah variabel *FV_PPE* dan *BIG4*. Analisis tersebut disimpulkan berdasarkan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Namun, jika dilihat berdasarkan tingkat signifikansi 0,1 ($\alpha = 10\%$), maka variabel *FV_PPE* dapat dikatakan memiliki pengaruh (*moderately significant*) pada variabel *SPREAD* yang merupakan proksi dari asimetri informasi.

Hasil *adjusted R square* untuk model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,601. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan variabel independen (*IFRS*, *FV_PPE*, *APPRAISAL*, *BIG4*, *PRICE*, *TUNROVER*, *SIZE*) dalam menjelaskan perubahan variabel dependen (*SPREAD*) dalam model regresi ini adalah sebesar 60,1%. Sebesar 39,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Penelitian ini ingin mencari tahu pengaruh adopsi IFRS, pemberian informasi nilai wajar PPE, serta pengungkapan penggunaan jasa penilai terhadap asimetri informasi. Tujuan tersebut tertuang dalam H1, H2, dan H3 secara berurutan. Hasil dari regresi linier menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan negatif antara variabel independen IFRS dan variabel dependen *SPREAD* yang merupakan proksi dari asimetri informasi. Hasil tersebut mendukung hipotesis bahwa adopsi IFRS secara signifikan mampu menurunkan asimetri informasi perusahaan (H1 diterima). Selanjutnya ditemukan pula bahwa variabel *APPRAISAL* signifikan negatif mempengaruhi variabel *SPREAD*. Hasil ini juga mendukung hipotesis bahwa pengungkapan penggunaan jasa *appraisal*

secara signifikan mampu menurunkan asimetri informasi perusahaan (H3 diterima). Namun, hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa variabel *FV_PPE* tidak signifikan positif mempengaruhi variabel *SPREAD*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan nilai wajar tidak signifikan positif mempengaruhi asimetri informasi pada level 5%, namun signifikan positif mempengaruhi asimetri informasi pada level 10%. Hasil ini berbeda dengan hipotesis yang mengatakan bahwa pemberian informasi nilai wajar dapat menurunkan asimetri informasi.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa 3 dari 4 variabel kontrol signifikan negatif mempengaruhi asimetri informasi. Ketiga variabel tersebut adalah *PRICE*, *TURNOVER*, dan *SIZE*. Arah yang ditemukanpun sesuai dengan prediksi, bahwa ketiga variabel tersebut berbanding terbalik dengan variabel *SPREAD*. Semakin tinggi / besar nilai *PRICE*, *TURNOVER*, dan *SIZE*, maka semakin rendah *SPREAD* atau asimetri informasi yang terjadi. Variabel kontrol yang tidak signifikan mempengaruhi *SPREAD* adalah *BIG4*. Hal tersebut berarti bahwa penggunaan jasa auditor big4 tidak mampu menurunkan asimetri informasi perusahaan. Hasil ini sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Muller dan Riedl (2002) bahwa *big4* tidak menurunkan asimetri informasi, karena fungsi dari auditor sendiri lebih sebagai pengawas yang lebih bertugas sebagai pemberi penegasan atas hasil yang dilakukan oleh para ahli, bukan sebagai penghasil informasi itu sendiri.

Beberapa hasil penelitian ini memang cenderung berbeda dari jurnal acuan utama yaitu Muller, Riedl, dan Sellhorn (2011). Kemungkinan penyebab perbedaan hasil yang terjadi adalah sebagai berikut.

1. Adanya perbedaan lingkup penelitian. Fokus utama penelitian Muller, Riedl,

dan Sellhorn (2011) adalah meneliti dampak adopsi IFRS, khususnya IAS 40 mengenai kewajiban pemberian informasi nilai wajar untuk akun *investment property* pada perusahaan properti. Penelitian tersebut berfokus untuk melihat apakah kewajiban memberikan nilai wajar dapat menurunkan asimetri informasi. Hasilnya menunjukkan bahwa peraturan tersebut (adopsi IAS 40) tidak mampu menurunkan dan mengeliminasi asimetri informasi secara keseluruhan pada badan usaha properti. Namun untuk *mandatory firm*, terdapat penurunan asimetri informasi yang signifikan dibandingkan dengan *voluntary firm*. Namun setelah adopsi IFRS pun, *mandatory firm* tetap memiliki asimetri informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *voluntary firm*. Hal tersebut diduga terjadi karena terdapat perbedaan kualitas nilai wajar yang dihasilkan antara kedua perusahaan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, fokus utama adalah melihat efek adopsi IFRS secara keseluruhan untuk seluruh sektor industri.

2. Karena ada perbedaan fokus penelitian, maka industri serta fokus akun yang diteliti pun berbeda. Penelitian Muller, Riedl, dan Sellhorn (2011) yang berfokus melihat dampak IAS 40 otomatis hanya berfokus pada badan usaha yang memiliki akun *investment property*, dimana akun tersebut secara umum dimiliki oleh perusahaan sektor properti. Studi ini menunjukkan bahwa adopsi IFRS di Indonesia mampu menurunkan asimetri informasi untuk keseluruhan badan usaha.
3. Adanya perbedaan negara pada sampel penelitian. Penelitian Muller, Riedl, dan Sellhorn (2011) menggunakan sampel badan usaha di

Eropa dan UK yang cenderung memiliki *capital market* yang besar dan berkembang, berbeda dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Menurut Fox *et al.* (2013) bisa terdapat perbedaan pengalaman dalam mengaplikasikan IFRS pada setiap negara. Setiap negara memiliki perspektif *stakeholder* yang unik, sehingga dapat membuat standar tertentu susah untuk dimengerti ataupun disesuaikan dibandingkan dengan negara yang lain. Pendapat ini bisa dikatakan mendukung kondisi yang terjadi pada penelitian ini, dimana terdapat perbedaan karakteristik *capital market* dan *stakeholder* antara Indonesia dan Eropa / UK, sehingga perbedaan hasil penelitian mungkin saja terjadi.

Namun, ada beberapa penelitian yang hasilnya sependapat dengan hasil penelitian ini. Penelitian Houque, Easton, dan Van Zijl (2014) menemukan bahwa adopsi IFRS memberikan efek positif pada kualitas informasi untuk negara – negara dengan perlindungan investor yang lemah. Negara dengan perlindungan investor yang lemah, mengalami peningkatan kualitas informasi yang semakin baik setelah adopsi IFRS. Cornell dan Sirri (1992) dalam Fox *et al.* (2013) juga berpendapat bahwa peningkatan pengungkapan IFRS cenderung menurunkan asimetri informasi antar pemegang saham, sehingga meningkatkan likuiditas saham perusahaan, penurunan *bid-ask spread*, dan peningkatan volume perdagangan saham perusahaan.

Selain itu Armstrong, *et al* (2010) juga menemukan bahwa IFRS bermanfaat positif khususnya untuk perusahaan yang memiliki asimetri informasi yang tinggi. Untuk badan usaha di Indonesia, dari total 590 perusahaan sampel, terdapat 250 perusahaan (42,37%) yang memiliki nilai *SPREAD* diatas rata-rata (rata-rata

SPREAD perusahaan sampel dapat dilihat pada tabel 2). Walaupun hanya 42,37% perusahaan yang memiliki *SPREAD* diatas rata-rata, hal tersebut tidak berarti bahwa 57,63% perusahaan yang lainnya memiliki asimetri informasi yang rendah. Karena bisa saja keseluruhan sampel memiliki asimetri informasi yang memang cenderung tinggi.

Selanjutnya, ternyata pengungkapan mengenai penggunaan jasa penilai yang digunakan mampu menurunkan asimetri informasi. Sebagai informasi, pengungkapan mengenai siapa penilai yang terlibat dalam menentukan nilai wajar bersifat wajib untuk perusahaan yang memilih metode revaluasi. Sedangkan untuk perusahaan yang menggunakan metode biaya, pengungkapan tersebut bersifat sukarela. Dari 590 sampel perusahaan, hanya 20 perusahaan yang menggunakan metode revaluasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan mengenai siapa penilai yang terlibat menunjukkan intensi dan komitmen perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih kepada publik. Intensi dan komitmen untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak itulah yang diduga menjadi penyebab turunnya asimetri informasi. Hal tersebut sesuai dengan argumen Diamond dan Verrecchia (1991) bahwa *voluntary disclosure* dan pengungkapan yang lebih banyak mampu menurunkan asimetri informasi perusahaan. Pemberian informasi secara sukarela (*voluntary disclosure*) menunjukkan intensi perusahaan untuk memberikan informasi lebih banyak ke publik, melebihi pengungkapan yang diwajibkan (*mandatory*). Intensi itulah yang dianggap mampu menurunkan asimetri informasi (Leuz dan Verrecchia, 2000).

Setiap pengambil putusan cenderung untuk meyakini informasi yang terjamin kredibilitasnya. Hal inilah yang

juga menjadi penyebab pengungkapan mengenai penggunaan jasa penilai mampu menurunkan asimetri informasi perusahaan. Hal ini didasarkan oleh hasil penelitian Muller dan Riedl (2002) yang menemukan bahwa keandalan nilai wajar akibat perbedaan penggunaan jasa *appraisal* mampu mempengaruhi asimetri informasi. Dengan memberi tahu siapa penilai yang terlibat, maka publik menangkap sinyal bahwa perusahaan berusaha menunjukkan keandalan pengukuran nilai wajarnya.

Mengenai penolakan hipotesis ke-2, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pemberian informasi nilai wajar tidak signifikan dalam mempengaruhi asimetri informasi. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

1. Muller dan Riedl (2002) mengatakan bahwa asimetri informasi akan lebih besar jika aset yang diestimasi nilai wajarnya terdapat unsur diskresi manajemen yang lebih besar. Pendapat ini dapat digunakan untuk mendukung hasil penelitian ini. Dimana penelitian ini menjadikan PPE sebagai objek penelitian. Pengukuran nilai wajar PPE cenderung subjektif (Kieso, Weygandt, dan Warfield, 2011), dan seringkali menjadi subjek diskresi manajemen. Karena cenderung menjadi subjek diskresi manajemen inilah, maka nilai wajar PPE yang diungkapkan tidak mampu mengurangi asimetri informasi, malah bisa jadi semakin meningkatkan asimetri informasi seperti yang dikemukakan oleh Muller dan Riedl (2002). Penentuan nilai wajar yang cenderung subjektif seringkali disalahgunakan oleh manajer, sehingga mampu mengurangi keandalan pengukuran nilai wajar yang dihasilkan (Fargher dan Zhang, 2014). Hal ini konsisten dengan

- gagasan bahwa keandalan pengukuran nilai wajar mampu mempengaruhi asimetri informasi.
2. Penelitian ini terbatas mengenai kualitas pengungkapan nilai wajar yang diberikan perusahaan. Menurut Muller, Riedl, dan Sellhorn (2011) bisa saja asimetri informasi tidak berkurang karena adanya pengungkapan nilai wajar yang *low-quality*.
 3. Muller dan Riedl (2002) mengatakan bahwa sebelumnya masih tidak jelas apakah perbedaan keandalan nilai wajar berpengaruh pada asimetri informasi, karena investor bisa mendapatkan informasi lain di luar laporan keuangan (seperti *index* penilaian properti), dan hal-hal seperti itu bisa saja mengatasi masalah perbedaan keandalan tersebut. Sebagai tambahan, perbedaan keandalan nilai wajar mungkin tidak mempengaruhi asimetri informasi jika pihak-pihak yang lebih tahu tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan atas pihak yang tidak tahu (bisa karena tidak sadar atau tidak bisa). Beyer *et al.* (2010) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa ada ketidakpastian respon investor terhadap suatu informasi yang diungkapkan perusahaan. Masing-masing investor bisa menginterpretasikan suatu informasi dengan kesimpulan yang berbeda-beda bahkan berkebalikan satu sama lain. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya perbedaan persepsi ataupun perbedaan pengalaman antar investor. Sebagai ilustrasinya, investor yang tidak berpengalaman bisa saja tidak bereaksi atas suatu informasi penting yang diberikan oleh perusahaan, sebaliknya *investor* yang berpengalaman dapat memproses informasi tersebut dengan sempurna.
 4. Berdasarkan Muller, Riedl, dan Sellhorn (2011), terdapat perbedaan kualitas nilai wajar pada perusahaan *mandatory* dan *voluntary*. Berdasarkan hasil analisis peneliti, terdapat beberapa perusahaan yang menyampaikan nilai wajar PPE-nya karena memiliki tujuan tertentu, yang berarti perusahaan tidak secara sukarela memberikan informasi tersebut. Beberapa alasan perusahaan memberikan nilai wajar berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan adalah (1) Perusahaan sedang melakukan kuasi reorganisasi, perusahaan yang melakukan kuasi reorganisasi pasti menilai kembali nilai wajar aset dan liabilitas yang dimiliki; (2) Menilai PPE berdasarkan nilai wajar karena perintah dari pemerintah; (3) Perusahaan sedang berada dalam kontrak utang yang mengharuskan perusahaan menilai aset – asetnya.

Kemungkinan untuk melihat efek pemberian informasi nilai wajar terhadap asimetri informasi juga dilakukan. Pemisahan analisis regresi untuk perusahaan berskala besar dan berskala kecil telah dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa baik pada perusahaan besar maupun pada perusahaan kecil sama – sama menunjukkan bahwa pemberian informasi nilai wajar PPE tidak mampu menurunkan asimetri informasi yang terjadi.

Selanjutnya, uji interaksi antara variabel IFRS dan FV_PPE juga dilakukan. Hasilnya menunjukkan arah sebaliknya. Hal tersebut berarti bahwa pengungkapan nilai wajar pada periode IFRS dapat menurunkan asimetri informasi walau tidak signifikan. Hasil ini semakin menguatkan dugaan bahwa tidak berhasilnya nilai wajar dalam menurunkan asimetri informasi lebih disebabkan adanya unsur diskresi manajemen dalam

menilai *fair value*. Menurut Dietrich, Harris, dan Muller (2000), penggunaan nilai wajar seringkali menjadi subjek diskresi manajemen, namun pada periode setelah *Financial Reporting Standard 3* (FRS 3) kecenderungan diskresi manajemen atas nilai wajar cenderung turun mungkin dikarenakan adanya peraturan *disclosure* yang semakin meningkat. Menurut hasil penelitian ini, adopsi IFRS signifikan menurunkan asimetri informasi. Seperti yang disajikan sebelumnya, IFRS sangat berkaitan erat dengan nilai wajar. Namun ternyata, informasi / pengungkapan nilai wajar tidak mampu menurunkan asimetri informasi. Hal ini menjelaskan bahwa bukan *fair value* lah yang menyebabkan IFRS mampu menurunkan asimetri informasi. Banyak hal lain diluar *fair value accounting* yang mampu menurunkan asimetri informasi. Karena perlu diingat bahwa IFRS mencakup banyak hal dan bukan hanya mengenai *fair value accounting* saja. Selain itu terbukti bahwa intensi manajemen dalam meningkatkan *disclosure* mampu menurunkan asimetri informasi. Kemudian dari hasil penelitian ini ditemukan pula bahwa publik menyukai informasi yang andal. Ketika publik menilai bahwa suatu informasi tidak andal, maka mereka tidak akan menganggap informasi tersebut sebagai sesuatu yang relevan. Dengan kata lain, suatu informasi menjadi tidak relevan jika informasi tersebut tidak andal (Fargher dan Zhang, 2014).

KESIMPULAN DAN PELUANG RISET BERIKUTNYA

Hasil pengujian menunjukkan bahwa implementasi IFRS dan pengungkapan jasa penilai berpengaruh negatif terhadap informasi asimetri. Hal ini berarti bahwa adopsi IFRS mampu menurunkan asimetri informasi perusahaan. Selain itu, pengungkapan mengenai penggunaan jasa

penilai ternyata juga mampu menurunkan asimetri informasi perusahaan.

Peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain : (1) Sampel penelitian hanya 4 tahun (2 tahun sebelum adopsi IFRS, dan 2 tahun sesudah adopsi IFRS). Hasil penelitian ini bisa saja berbeda pada jangka panjang, terutama jika negara atau perusahaan meningkatkan implementasi dan penyelenggaraan standar akuntansi yang ada. (2) tidak ada percobaan perbedaan asimetri informasi antara perusahaan yang menggunakan metode revaluasi dan mengakui nilai wajar di neraca (*recognize*) dengan perusahaan yang menggunakan metode biaya sehingga hanya memberikan nilai wajar melalui pengungkapan (*disclose*) di CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Hal tersebut didasarkan pada Muller, Riedl, Sellhorn (2011), bahwa perbedaan asimetri informasi tidak terjadi antara perusahaan yang mengakui nilai wajar di neraca dan yang hanya mengungkapkan di CALK. Selain itu, tidak memungkinkan untuk membandingkan asimetri informasi antara kedua macam perusahaan tersebut, karena dari 590 perusahaan yang menjadi objek penelitian, hanya 20 perusahaan saja yang menggunakan metode revaluasi. Jumlah tersebut dianggap terlalu sedikit untuk dapat merepresentasikan dan menyimpulkan fenomena yang terjadi. (3) Karena adanya keterbatasan data, peneliti tidak dapat melihat perbedaan asimetri informasi antara perusahaan yang menggunakan jasa penilai eksternal dan internal. (4) Penelitian ini terbatas mengenai keandalan nilai wajar dan kualitas pengungkapan nilai wajar yang diberikan perusahaan. (5) Peneliti melakukan analisis secara keseluruhan, tanpa memisahkan masing – masing sektor. Ada kemungkinan bahwa terdapat hasil yang berbeda – beda untuk masing-masing sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Christopher, M. E. Barth, A. D. Jagolinzer, E. J. Riedl. (2008). *Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe*.
- Beaver, W., M. Venkatachalam. (2003). *Differential Pricing of Components of Bank Loan Fair Values*.
- Beyer, Anne, D. A. Cohen, T. Z. Lys, B. R. Walther. (2010). *The Financial Reporting Environment : Review of The Recent Literature*. *Journal of Accounting and Economics* 50 (2010) 296 – 343
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).(2012). Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Diamond, Douglas W., R. E. Verrecchia. (1991). *Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital*. *The Journal of Finance* : Vol. 46, No.4, pp. 1325 - 1359
- Dietrich, J.R., M. S. Harris, dan K. A. Muller III.(2000). “*The reliability of investment property fair value estimates*”, *Journal of Accounting and Economics (JAE)*, Vol. 30 No. 2, pp. 125-58.
- Fargher, Neil, J. Z. Zhang. (2014). *Changes in The Measurement of Fair Value : Implications for Accounting Earnings*. *Accounting Forum* 38 (2014) 184 - 199
- Flannery, M. J., S. H. Kwan, M. Nimalendran. (2004). *Market Evidence on The Opaqueness of Banking Firms' Asset*. *Journal of Finance Economics* 71 (2004)
- Fox, Alison and G. Hannah, C. Helliar, M. Veneziani . (2013). *The Costs and Benefits of IFRS Implementation in the UK and Italy*. *Journal of Applied Accounting Research (JAAR)*, Vol. 14 No. 1, 2013, pp. 86 - 101
- Healy, Paul M., Krishna G. Palepu. (2001). *Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets : A Review of The Empirical Disclosure Literature*. *Journal of Accounting and Economics* 31, 405 – 440.
- Houge, Muhammad N., S. Easton, T. Van Zijl. (2014). *Does Mandatory IFRS Adoption Improve Information Quality in Low Investor Protection Countries?.* *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation* 23 (2014) 87 - 97
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). Majalah Akuntan Indonesia Edisi 14/tahun III/Februari 2009 , Berjudul *FAIR VALUE, Shifting Paradigm : Historical Cost to Fair Value*
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). Majalah Akuntan Indonesia Edisi 16/tahun III/April 2009 , Berjudul : Selamat Datang 2009

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). Majalah Akuntan Indonesia Edisi 19/tahun III/Agustus 2009 , Berjudul : Globalisasi Profesi Akuntansi Sudah Dimulai.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). Majalah Akuntan Indonesia Edisi 20/tahun III/Oktober 2009
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. (2011). *Intermediate Accounting IFRS Edition, Volume 1*. USA : John Wiley & Sons Inc.
- Leuz, Christian, R. E. Verrecchia. (2000). *The Economic Consequences of Increased Disclosure. Journal of Accounting Research Vol 38 Supplement 2000.*
- Liao, Lin, H. Kang, R. D. Morris, Q. Tang. (2013). *Information Asymmetry of Fair Value Accounting during the Financial Crisis. Journal of Contemporary Accounting & Economics*
- Muller III, K.A. and Riedl, E.J. (2002).*External Monitoring of Property Appraisal Estimates and Information Asymmetry. Journal of Accounting Research (JAR)*, Vol. 40 No. 3, pp. 865-81.
- Muller III, K. A., E. J. Riedl, T. Sellhorn. (2011). *Mandatory Fair Value Accounting and Information Asymmetry : Evidence from the European Real Estate Industry.*
- Zamzami, Faiz. (2011). Perkembangan Konvergensi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* di Indonesia. <http://www.sai.ugm.ac.id/site/images/pdf/ifrs.pdf>